

## Pagelaran wayang kulit: pemanfaatan dalang sebagai propaganda politik 1986-1990

Melinda Agil Pangesti <sup>1</sup>, R. Wisnubroto <sup>2</sup>, Nur'aeni Martha <sup>3</sup>.

Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta Indonesia, 13220, Indonesia, melindaagilpangest126@gmail.com

Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta Indonesia, 13220, Indonesia, rwisnubroto@gmail.com

Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta Indonesia, 13220, Indonesia, nuraeni@unj.ac.id

\* melindaagilpangest126@gmail.com

### Abstract

*The shadow puppet is a cultural heritage of Indonesia that has emerged decades ago, which has also been recognized by the world. The puppet is a means of entertainment, as well as a place to express ideas. After the tragedy of the September 30th Movement, the New Order government issued a strategy for the continuation of social and political authority. This research examines wayang performance, namely the role of the puppeteer (dalang) in conveying development propaganda in Indonesia, especially in Banyumas, Central Java in 1986-1990. Wayang kulit performances during the New Order era through modified stories with developmental nuances.*

### Keywords

*Dalang; New Order; National Development;*

### Abstrak

Tradisi wayang kulit merupakan warisan budaya Indonesia yang kemunculannya sejak puluhan tahun lalu, yang mana sudah diakui pula oleh dunia. Wayang sebagai sarana hiburan, juga sebagai tempat menuangkan gagasan. Pasca tragedi Gerakan 30 September, pemerintah Orde Baru mengeluarkan strategi dalam keberlangsungan otoritas sosial dan politik. Dalam penelitian ini mengkaji pementasan wayang, yaitu peran dalang dalam menyampaikan propaganda pembangunan di Indonesia, khususnya di Banyumas, Jawa Tengah pada tahun 1986-1990. Pertunjukan wayang kulit pada era Orde Baru menggunakan lakon yang telah dimodifikasi bernuansa pembangunan.

### Kata kunci

*Dalang; Orde Baru; Pembangunan Nasional*

*\*Received: April 2021*

*\*Revised: May 2021*

*\*Accepted: May 2021*

*\*Published: May 2021*

### Pendahuluan

Seni pagelaran wayang kulit terus berkembang dari masa ke masa. Era Orde Lama yang berlangsung sejak tahun 1945, dimana kala itu Indonesia baru saja memperoleh kemerdekaan, yakni pada kepemimpinan Soekarno, pertunjukan wayang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Antusias mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama menggarap lakon wayang, bahkan seni pedalangan yang menjadi tokoh penting dalam

pementasan. Kursus pedalangan lahir pada tahun 1953 bernama “Himpunan Siswa Budaya” di Yogyakarta dengan guru R.M Sri Handayakusuma, Susilaatmaja, Pringga Satata dengan 14 orang Mahasiswa (Mulyono, 1982) dan beberapa tempat kursus ternama lainnya di Semarang. Salah satu momok peristiwa penting dalam perkembangan seni pedalangan wayang kulit purwa yaitu didirikannya “Kongres Pedalangan Indonesia” yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 28 Agustus 1958 di Perang Wedanan Kompleks Keraton Surakarta. Sejak awal 1950-an, berbagai partai politik dominan mulai membangun organisasi massa mereka, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI) (Eklöf, 2003) turut menyajikan perhatiannya kepada peran dalang wayang kulit purwa dalam memobilisasi rakyat untuk kepentingan partainya.

Setelah tragedi Gerakan 30 September 1965 berkejolak, oknum-oknum PKI diberantas, begitupun sosok dalang dalam seni pewayangan. Bagi dalang siapapun yang lolos dari penangkapan dilarang mengadakan pagelaran dalam kurun waktu tertentu. Mereka dituntut agar wajib mendaftarkan diri, melaporkan, dan menyerahkan naskah cerita yang hendak dipertontonkan (Groenendael, 1987). Dominasi pemerintah terhadap seniman khususnya dalang kian meningkat manakala dimulainya Orde Baru pada tahun 1966. Terbukti pada saat diselenggarakan konferensi 18-19 Desember 1966, yang terdiri dari 80-an peserta membentuk organisasi dalang pertama pada era Orde Baru bernama “Himpunan Kebaktian Dalang”. Tiga tahun berada di naungan Soeharto, Taman Ismail Marzuki menggelar sidang pada 25-27 Juli dalam rangka memperjelas sindikat “Peranan Dalang dan Pertunjukan di dalam Pembangunan Negara pada Khususnya”. Pagelaran wayang kulit dimanfaatkan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan pembangunan dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan nasional, serta administrasi.

Dalang dirancang sedemikian rupa sebagai penerang masyarakat tentang perkembangan kehidupan Bangsa dan Negara, puncaknya sebagai mass-media yang turut menyukseskan “Rencana Pembangunan Lima Tahun” (REPELITA) (Mulyono, 1982). Kala itu perhatian besar juga ditujukan pada kelancaran program Keluarga Berencana, yang bertujuan menyukseskan pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai tanpa terhambat oleh pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Atas perintah Presiden, ditegaskan bahwa dalang memiliki kedudukan istimewa dengan tugas dalang bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai pembangunan, tetapi sekaligus menyalurkan keinginan dan harapan masyarakat dari bawah. Integritas wayang termasuk kedudukan dalang yang netral dipaksakan oleh strategi Orde Baru dalam keberlangsungan otoritas sosial dan politik.

Begitu Mayor Jenderal Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, bentuk kebijakan komunikasi massa diperketat seperti *jurnalistik*, *public relations*, penerangan, pertunjukan, propaganda, dan lain sebagainya. Khususnya teruntuk pagelaran wayang kulit sendiri di sekelilingnya berpusar kepentingan pemerintah dengan bentuk komunikasi massa propaganda. Keberadaan propaganda kerap dijadikan alat rezim yang ingin

mempertahankan kekuasaan seseorang melalui ajakan atau doktrin secara sengaja kepada orang guna menerima suatu pandangan, ide, aturan, nilai, dan lain-lainnya.

Orientasi dari pemerintah menjadikan dalang sebagai tokoh yang ditiru masyarakat mendorong lahirnya “Lembaga Pembina Seni Pedalangan Indonesia” (Ganasidi) yang diresmikan ketika Konferensi Pedalangan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang bertempat di Semarang pada 10-12 Juli 1969. Lembaga ini merekrut para dalang yang terbebas dari organisasi terlarang dan tidak terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Tidak lain tujuan dibentuknya Ganasidi adalah untuk membina peran pedalangan sebagai sarana mendidik dan membimbing umat manusia yang berjiwa Pancasila. Perlahan Ganasidi berafiliasi kepada *Sad Satya Darma Dalang* yang menyangkut pokok-pokok pedoman dalang di seluruh Indonesia.

Pada Pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, dalang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan kampanye, sehingga tidak terlihat kesesuaian cerita wayang yang sesungguhnya akibat dikemas menjadi cerita yang berisi program-program pemerintah secara vulgar dan dilebih-lebihkan. Selain itu, sebagaimana yang kita ketahui pada tahun tersebut Golongan Karya (Golkar) mendominasi kemenangan hingga Pemilu 1977 dan 1982. Sehingga lakon yang dipilih untuk ditampilkan adalah lakon *Ringin Kencana* atau *Beringin Emas* sebagai analogi dari lambang Golkar yakni “pohon beringin”. Sementara penyampaian program-program pembangunan dianalogikan melalui cerita *Babad Alas Mertani*, lakon *Bima Suci*, serta lakon *Duryudana Gugur* pada adegan *gara-gara* dan *limbukan*. Lain halnya di tahun 1989, pagelaran wayang kulit turut serta dalam permasyarakatan dan pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 yang nampak pada tokoh *punakawan*. Pesan-pesan pemerintah dalam pagelaran wayang kulit diekspresikan melalui dialog atau humor antar tokoh wayang, kalimat sindirian, bahasa isyarat, dan sebagainya sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Tulisan mengenai Pagelaran Wayang Kulit di zaman Orde Baru pada dasarnya telah dilakukan oleh beberapa penulis seperti Marshall Alexander Clark dalam bukunya yang berjudul *Wayang Mbeling: Sastra Indonesia Menjelang Akhir Orde Baru*. Namun, buku tersebut hanya mengkaji cara yang digunakan untuk menghindari sensor pemerintah, melalui wayang sebagai sarana ekspresi kritik sosial dan politik. Wayang Mbeling adalah hasil penulisan ulang cerita wayang yang dimanipulasi dengan bahasa satire, keluar dari pakem, dan berisi kritik tajam terhadap pemerintah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menambah kajian dengan Banyumas menjadi objek penelitian dikarenakan Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah yang mencakup berbagai kegiatan administrasinya di bawah komando pemerintah pusat, yakni Semarang. Unsur kebudayaan di Banyumas pun begitu kental, bahkan hampir menyinggung unsur budaya di Yogyakarta maupun Surakarta. Dalam pelaksanaan kebijakan berbagai aspek kehidupan, yang mencakup pagelaran wayang kulit tercipta oleh ketetapan birokrat yang berada di Semarang. Tulisan ini akan berfokus pada proses propaganda kebijakan pembangunan Orde Baru dalam pagelaran wayang kulit di Banyumas tahun 1986-1990.

## Metode

Untuk mencapai tujuan penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan model deskriptif-naratif yaitu, penulis mendeskripsikan secara logis dan sistematis dalam penelitian ini (Kartodirdjo,1993). Metode penelitian sejarah yang digunakan oleh sejarawan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian tersusun dalam empat tahapan yang mencakup Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik), Interpretasi (menafsirkan), dan Historiografi (penulisan) yang diungkapkan oleh Louis Gottschalk (Gottschalk, 1975). Tahap *pertama*, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan tema penulisan yang terdapat di beberapa perpustakaan seperti, Perpustakaan UNJ, Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Daerah Purwokerto, Ruang Baca Prodi Sejarah UNJ, Museum Wayang Banyumas. Penulis juga mendapatkan Arsip dan Surat Kabar yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Arsip Jawa Tengah. Selain itu dalam sumber lisan, penulis melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa seperti Ki Dalang Kedot Suprpto, Ki Dalang Slamet Waluyo, Ki Dalang Purwanto, Ki Dalang Tugino, dan sejumlah tokoh Golkar.

*Kedua*, verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap ini peneliti akan mengkaji dan mengkritik sumber melalui keasliannya dengan melihat aspek jenis media, tahun pembuatan media, penulis media, dan gaya penulisan media (untuk dokumen dan artefak), hubungan narasumber dengan topik, dan kredibilitas narasumber (untuk wawancara). *Ketiga*, interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini peneliti akan menafsirkan fakta-fakta historis dari sumber sejarah yang telah diverifikasi sebelumnya. *Keempat*, historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini, sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan akan ditulis secara sistematis, terstruktur, dan objektif. Penulisan sejarah ditulis sesuai dengan kebutuhan topik dan sesuai fakta yang didapat melalui sumber.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Berseminya Politik Orde Baru

#### Keadaan Geografis Banyumas

Banyumas merupakan sebuah dataran rendah yang terbentang dari sisi barat daya Provinsi Jawa Tengah, tepat berada di antara 5° Lintang Selatan, 10° Lintang Utara dan 105° Bujur Timur, 115° Bujur Barat dari rangkaian kepulauan Nusantara bagian barat. Secara geografis, wilayah Banyumas memiliki empat kabupaten sebagai pusat administrasi pemerintahan, yaitu Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Pada bagian barat, Banyumas berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Sungai Citanduy sebagai batas teritorialnya. Sementara di sebelah selatan

berbatasan dengan pantai Samudera Hindia, sebelah tenggara berbatasan dengan Bagelen (Kabupaten ebumen), sebelah timur dengan Kabupaten Wonosobo, serta sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.

Pasca berakhirnya Perang Diponegoro (1825-1830), Kadipaten Banyumas melepaskan diri dari kekuasaan Kasunanan Surakarta dan menjadi daerah kolonial Hindia Belanda tepatnya pada tanggal 22 Juni 1830. Sejak saat itu Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mulai melaksanakan eksploitasi secara ekonomi dan politik. Pemerintah Hindia Belanda memecah kabupaten Banyumas menjadi dua kabupaten, Banyumas dan Ajibarang. Ketika tahun 1832, Bupati ke-2 Ajibarang, Mertadiredja II memindahkan ibu kota kabupaten dari Ajibarang ke kota Purwokerto. Namun, pada kurun waktu berikutnya ketika resmi menjadi keresidenan wilayah Banyumas terdiri dari 5 kabupaten yaitu Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto, dengan areal seluas 3803 pal persegi (Herusatoto, 2008). Sebutan keresidenan bagi wilayah Banyumas pada akhirnya dihapuskan pada masa pemerintahan Orde Baru, dan sejak itulah hanya tersisa empat kabupaten karena Purwokerto digabungkan dengan Banyumas. Sudah sewajarnya seluruh elemen masyarakat mengetahui sejarah asal muasal berdirinya Kabupaten Banyumas. Dengan tegas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas membentuk Panitia Khusus Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Melalui SK DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor: 172/09/1988 tanggal 11 Oktober 1988. (Adisarwono & Bambang, 1992).

Sesungguhnya pertanyaan siapa yang mendiami wilayah ini dapat terjawab oleh orang asli Banyumas yang memahami aspek historis, sosiologi, dan kulturologi Banyumas. lalah disebut sebagai *wong Banyumas*, yang mengakui dirinya memiliki leluhur sampai dengan orang tuanya dilahirkan, meninggal dunia atau seumur hidupnya menetap di wilayah yang dahulunya menjadi wilayah Kadipaten Pasirluhur, Dayeuhluhur, Pasirbatang, Wirasaba I (zaman Hindu), Kadipaten Wirasaba II (zaman pra-Islam), “Mrapat” (Kejawar/Banyumas, Wirasaba/Purbalingga, Banjar Petambakan/Banjarnegara, Merden/Cilacap) sampai menjadi wilayah Karasidenan Banyumas.<sup>11</sup> Hingga hari ini, siapa saja yang pernah tinggal-menetap di wilayah Banyumas, melahirkan keturunannya, dapat bergaul dengan masyarakat Banyumas, dan masih mengakui dirinya memiliki trah Banyumas meskipun sekarang ini tidak lagi tinggal di Banyumas karena suatu pekerjaan atau lain hal, maka mereka itu tetap menjadi *wong Banyumasan*.

Sejarawan elite mencatat bahwa *wong Banyumas* terdiri dua etnis yang saling bermutualisme yakni ayah dari etnis Jawa dan ibu dari etnis Sunda. Pembaharuan yang terjadi pada akhirnya melahirkan sebuah keluarga besar yang hidup rukun berdampingan, terus berkesinambungan dalam sejarah dan menciptakan kehidupan sosial-budaya yang khas sebagai cerminan dari kedua suku tersebut. Penduduk yang mendiami wilayah ini juga memiliki tingkat bahasa krama Sunda yang banyak kesamaannya dengan tingkat bahasa krama lugu bahasa Banyumasan. Akibat kerap kali

mengalami pemekaran, maka cara bicara orang Banyumas menjadi campur aduk tidak karuan. Dalam logat bahasa *ngoko lugu* (Jawadipa) atau *Jawa Koek* (Jawa Kuno) dan *Jawa Kramantara*, dimana sekarang ini disebut sebagai bahasa “Bandekan”, disebutnya sebagai bahasa *Ngapak*, yaitu *bahasa Ibu* dari bahasa umumnya orang Banyumasan.

Karakteristik orang Banyumas di ilustrasikan pada tokoh Punakawan dalam pewayangan yang bernama Bawor. Secara etimologis, Bawor berasal dari bahasa Kawi, yaitu “Ba” artinya “Sunar” (cahaya atau sinar), dan “Wor” artinya “Awor” (campur). Bawor memiliki citra yang sangat baik karena memiliki watak sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan kesehariannya. Sifat kejiwaan yang dilukiskan juga berjiwa jujur, berkepribadian baik, toleran, rukun, suka membantu orang lain, mementingkan kepentingan bersama, rajin, cekatan, dan lahir batinnya terbuka ketika berbicara secara spontan dengan bahasa yang lugas tanpa eufemisme. Sifat dan sikap Bawor mencerminkan tingkah laku dari masyarakat Banyumas, yaitu sangat melekat dengan kehidupan alamiah. Bawor bukanlah tokoh arogan meskipun kental dengan romansa kehidupan keraton yang megah. Begitu pula *wong Banyumasan*, mayoritas penduduknya hampir tidak pernah membedakan jabatan maupun derajat lawan bicaranya, maka hal inilah sehingga orang Banyumas pantas dicirikan seperti tokoh Bawor.

### **Perhelatan Kebijakan Orde Baru**

Memahami latar belakang Orde Baru memang membutuhkan waktu untuk menengok masa Demokrasi Terpimpin silam. Kharisma seorang Soekarno yang rupawan memegang rezim dengan kekuatan poros utama yakni beliau sendiri, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Persaingan yang terjadi di antara ketiga kekuatan politik tersebut banyak mengabaikan persoalan politik dan ekonomi yang lebih mendasar. Situasi semacam ini melahirkan krisis politik dan ekonomi yang memuncak pada kudeta 30 September 1965 dan berlanjut dalam kurun waktu berikutnya (Mas’oed, 1989). Kudeta yang dilakukan terhadap Orde Lama menimbulkan koalisi yang beranggotakan seluruh kelompok beragama, mahasiswa, dan kaum intelektual anti komunis. Terkhusus Angkatan Darat, menghadapi beberapa tantangan yang mengancam eksistensinya. Pada akhir 1950-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi dalam neraca pembayaran internasional, inflasi yang terus meningkat dan defisit anggaran yang memuncak pada 1965 ketika Indonesia di ambang kebangkrutan .

Secara sigap, Orde Baru lahir dengan menyongsong investasi asing yang semula menghilang di bawah pemerintahan Soekarno atas alasan ideologis, ketidakstabilan politik, dan pengelolaan perekonomian yang salah (Jusuf, 2018). Runtuhnya Orde Lama maka hilanglah slogan “politik sebagai panglima” dan muncullah slogan baru “ekonomi sebagai panglima” yang diciptakan oleh para pembuat pendapat umum yang sebelumnya ditindas oleh rezim tersebut (Mas’oed, 1989). Elite politik Indonesia pada masa pasca kemerdekaan sejatinya tidak memiliki konsep yang utuh tentang pembangunan ekonomi, terkecuali satu hal yaitu anti kolonialisme dan imperialisme. Apa yang telah dibangun oleh rezim baru yang berkuasa hampir 32 tahun itu menjunjung tinggi sikap

Weberian dan meningkatkan daya saing mereka dengan skema kerja sama yang erat antara pemerintah dengan swasta dalam bidang pengembangan usaha, sumber daya manusia, ilmu dan teknologi.

### **Propaganda Pagelaran Wayang Kulit Orde Baru Dalang dalam Pusaran Orde Baru**

Dalang adalah tokoh utama dalam semua penyajian pagelaran wayang kulit. lalah sang penutur kisah, penyanyi suluk, yang membawa penonton untuk memahami suasana dari alur cerita, tepatnya dialah sang pemberi jiwa pada wayang. Dalang memiliki tuntutan pengetahuan dan keterampilan dalam alur cerita, seperangkat gamelan, suluk, dan teknik pagelaran. Berpadunya pengetahuan keduniawian dan gaib akan membentuk apa yang dinamakan pedhalangan, yakni ilmu atau seni dalang (Groenendael, 1987). Dalam kepercayaan orang Jawa, dalang dipandang sebagai tokoh utama penguasa yang memiliki kekuatan untuk menguasai dan mengayomi kehidupan, dan sebagai suatu mata rantai penghubung antara manusia dan dewa, antara tertib masyarakat dan tertib dunia (Groenendael, 1987).

Mendalang di masa Orde Baru, utamanya di daerah pedesaan sangatlah berbeda dengan mendalang di kota besar. Mayoritas dalang yang mementaskan dirinya dalam pagelaran semalam suntuk adalah dalang sejati. lalah salah seorang dalang yang paling tinggi tingkatannya karena memiliki kemampuan termasuk juga menyelenggarakan upacara ruwatan. Dalang wayang kulit purwa yang terkenal pada dekade 1960 hingga 1997-an antara lain, Pujasumarta Wignyasutarna, Nartasabda, Timbul Hadiprayitno, Anom Suroto, Hadisugito, Sugino Siswocarito, Panut Darmoko, Manteb Soedharsono, Sugito Purbocarito, Purbo Asmoro, Warseno, dll (SENA WANGI,1999). Termasuk di Banyumas, selain tokoh seniman dalang Sugino dan Sugito yang melegenda, dalang Kedot Suprpto pun menjadi sorotan publik dalam suksesi kebijakan pemerintah Orde Baru.

Sedikit kilas balik terhadap Orde Lama, pemerintahan Presiden Soekarno menitikberatkan pada pelestarian pagelaran wayang kulit. Pada tanggal 23 hingga 28 Agustus 1958 diselenggarakan Kongres Pedalangan Indonesia di Prangwedanan, Kompleks Keraton Mangkunegaran, Surakarta (Mulyono, 1982). Kongres Pedalangan Indonesia ke-1 dibentuk dalam rangka sekaligus menyempurnakan lembaga pewayangan “Panunggaling Dalang Republik Indonesia” (PADRI) yang didirikan pada 6 Desember 1953. Perlu diketahui bahwa situasi Indonesia pada awal kemerdekaan dipenuhi oleh berbagai konflik dengan pihak kolonial. Pedalangan hidup dan tumbuh sendiri dalam masyarakat. Begitu juga pertunjukan wayang kulit selalu digarap oleh para intelek dari kampus-kampus ternama. Perkembangan pertunjukan wayang kulit di era Orde Lama terbagi menjadi dua macam bentuk pagelaran. Yaitu bentuk tradisi lama (9 jam) dan bentuk baru (4 atau 5 jam) dari jam 20.00-01.00. Usaha pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakannya selalu disampaikan melalui cerita wayang *Gatutkaca Nagih Janji*. Atas arahan Presiden Soekarno, semua partai politik terlibat untuk memanfaatkan wayang kulit sebagai media propaganda. Partai-partai tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai lakon Pandawa “yang berada dalam pihak yang

benar” dalam cerita Mahabarata (Clark, 2008). Tuter seorang dalang di Banyumas pun menyebutkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah melibatkan pagelaran wayang kulit dalam mengorganisasi massa untuk tujuan-tujuan kepartaiannya.

Kesenian wayang kulit tidak pernah punah pada masanya, hanya saja beberapa pagelaran terpaksa diberhentikan karena memicu protes masyarakat. Puncaknya adalah ketika tahun 1966, tepat setahun setelah tragedi 30 September 1965, situasi pemerintahan Soekarno semakin merosot. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi saat itu mengeluarkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu dibubarkan PKI, rombak pemerintahan kabinet, dan turunkan harga (Wanandi, 2014).

Semenjak Jenderal Soeharto menjadi presiden sepenuhnya, beliau banyak mencetuskan langkah untuk mengatasi persoalan ekonomi dan politik. Inisiatifnya diorientasikan pada usaha penyelamatan perekonomian negara yang kalut pasca Orde Lama.

Pagelaran wayang kulit memiliki kekuatan penuh untuk propaganda kebijakan Orde Baru. Realitanya banyak sekali jenis kesenian tradisional yang mengakar di Banyumas. Namun, media komunikasi yang paling mudah disisipi propaganda adalah wayang kulit. Mengingat, wayang kulit sebagai warisan budaya leluhur memiliki eksistensi yang tak pernah padam. Selain itu, wayang kulit telah mengakar pada jiwa orang Jawa, sehingga tanpa memandang golongan baik kaum elite maupun masyarakat biasa sangat menggemari pagelarannya. Pemerintah menganggap pagelaran wayang kulit adalah media yang efektif di Banyumas guna menyampaikan kebijakan-kebijakan Orde Baru. Sosok dalang yang utama dalam pagelaran wayang kulit juga mudah berbaur dengan penguasa yang mampu mempengaruhinya.

Pasca peristiwa menegangkan 30 September 1965 yang berlanjut pembantaian simpatisan PKI di Indonesia, hal ini berdampak pada kedudukan seorang dalang. Para dalang yang tidak dibunuh dan lolos dari pembersihan oknum-oknum PKI dilarang mengadakan pertunjukan wayang kulit selama kurun waktu tertentu. Pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan yang ketat terhadap pagelaran wayang kulit. Dalang diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya, melaporkan rencana pagelaran hingga menyerahkan cerita atau lakon yang hendak dimainkan. Kepala Inspeksi Urusan Kebudayaan Daerah Jawa Tengah, F. Soetrisno pada tahun 1966 menggambarkan pemimpin Orde Baru sebagai rezim pragmatis dan realistik (Groenendael, 1987). Seniman yang hidup pada zaman Orde Baru hendaknya sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Sosok dalang harus memiliki antusiasme dalam menyebarluaskan cita-cita Orde Baru yang menyangkut aspek politik, sosial dan kebudayaannya.

Orde Baru terus berupaya menghasilkan sebuah organisasi dalang yang bernama Himpunan Kebaktian Dalang (HKD) yang bertujuan untuk membantu dalang dalam mengemban tugas baru dari pemerintah. Organisasi HKD menjadi organisasi dalang pertama pada masa Orde Baru, yang didirikan berdasarkan hasil konferensi 80-an peserta pada 18 dan 19 Desember 1966 di Surakarta. Berstatus semi pemerintah, organisasi ini membantu meningkatkan stabilitas politik Orde Baru. Tugas utamanya

adalah mempersatukan dalang sekaligus meningkatkan kualitas seni pedalangan, selebihnya menyukseskan program pembangunan pemerintah di setiap daerah. Meskipun coordinator utamanya di Surakarta, HKD memiliki cabang-cabang di setiap kabupaten di Jawa Tengah. Semenjak itu, pemerintah semakin dekat dengan sosok dalang. Adaptasi di antara keduanya membawa janji Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama atau Repelita. Melalui dalang, pagelaran wayang kulit bertujuan mewujudkan cita-cita Orde Baru.

Repelita secara resmi dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 sebagai landasan awal pembangunan Orde Baru (Sudirman, 2019). Tujuan Pelita I adalah menekankan pembangunan dalam bidang pertanian. Melihat sasaran Pelita I adalah papan, pangan, dan sandang maka pemerintah ingin segera memberantas keterbelakangan ekonomi melalui pembaruan bidang pertanian. Indoktrinasi pemerintah kepada dalang semakin jelas, yakni memajukan mutu seni pedalangan harus selaras dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Orde Baru, yaitu pembangunan yang akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Sementara itu, Presiden juga memperhatikan sektor kehidupan yang lain salah satu diantaranya adalah pembatasan angka kelahiran. Dalang harus bisa menyuluhkan rencana pemerintah tersebut dengan baik. Keterlibatan seni pedalangan terhadap kebijakan pemerintah dilegitimasi melalui pembentukan Lembaga Pembinaan Seni Pedalangan Indonesia (GANASIDI) pada tanggal 7 Desember 1969. Sebagian besar organisasi ini berdiri untuk mewadahi seniman dalang, namun juga ditujukan pada seniman pengrawit, pesinden, dan penggerong. GANASIDI lahir di Semarang dan selanjutnya melahirkan pimpinan di setiap daerah khususnya Banyumas yang menembus ke lapisan kecamatan.

Proses modernisasi terhadap rakyat di Banyumas lebih tepatnya diorganisir oleh Persatuan Pedalangan Indonesia, atau dalang sering menyebutnya dengan istilah Pepadi. Mayoritas dalang yang berada di pusaran pemerintah rezim baru digunakan untuk kepentingan kampanye. Seperti penuturan Ki Dalang Kedot Suprpto, ia memandang perintah dari pemerintah tidak mungkin dibantah. Sehingga wajar jika dalam menyampaikan pesan-pesan pemerintah terkesan sangat terbuka. Pagelaran wayang kulit semakin dimantapkan dalam Sarasehan Dalang Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 24 Juli 1986. Sarasehan itu memiliki tujuan utama untuk menyukseskan Pemilu 1987. Prospek utama Pemilu dari tahun pertama Orde Baru hingga Pemilu 1992 disarankan agar kemenangan berpihak pada Golongan Karya dan menjadi penjamin politik pembangunan (Reeve, 2013). Dalang-dalang di Banyumas menyebut dirinya sebagai motivator pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

### **Teknik Propaganda Orde Baru**

Beberapa seniman di Banyumas, khususnya Dalang Kedot merasa ide-idenya muncul dan dapat dikembangkan walaupun memiliki keterbatasan dalam berekspresi. Dan satu hal lagi, bahwa di era Presiden Soeharto sering diadakan pameran dan pertunjukan seni, bersama para seniman lain baik dari dalam maupun luar negeri (Sari &

Sage, 2006). Peranan dalang dan wayang kulit wajib melibatkan unsur pembangunan pada setiap pagelarannya. Dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan, setiap pagelaran secara umum memiliki teknik tertentu yang digunakan.

Menurut tradisi lisan, setiap pementasan wayang kulit di Banyumas menggunakan pedalangan Gagrag Banyumas. Adapun runtutan pakeliran Gagrag Banyumas sebelum dimulainya pertunjukan semalam suntuk, terlebih dahulu dipersembahkan sebuah gamelan atau gendhing-gendhing dari para pemain gamelan kepada penonton. Gamelan memainkan gendhing-gendhing *Gangsaran, Liwung, Manyar Sewu*, atau yang berwujud Lancaran. Setelah *gendhing-gendhing* pembuka selesai, dilanjutkan dengan *Gendhing Patalon* sebagai pertanda dalang naik ke panggung. Adegan *jejer kapisan* dilanjutkan adegan *ginem, paseban jawi, budhalan, adegan singgetan, adegan sabrang, gara-gara, adegan pratapan, sintren*, adegan *manyura* atau *manyuri, tayungan*, dan terakhir adalah adegan *pungkasan* atau penutup. Pesan-pesan pembangunan di masa Orde Baru secara umum disampaikan melalui tiga cara (Kedot, 2020).

- a) *Melok*, yaitu penyampaian pesan pembangunan yang bersifat vulgar, tanpa perlu membungkus dalam bahasa Kawi pedalangan. Dalang langsung menyebutkan pesan pembangunan sesuai dengan program yang diterapkan. Cara menyampaikan pesan pembangunan melalui *melok* dapat dilakukan pada adegan *gara-gara*. Dalang melibatkan adegan setengah *melok* pada saat *janturan* dan *sulukan*.
- b) *Medhang miring*, pesan pembangunan disampaikan melalui bahasa pedalangan tanpa menghilangkan unsur melok. Keterlibatan adegan *janturan, pocapan, dan sulukan* akan lebih pakem jika menggunakan teknik *medhang miring* beserta *nyampar pikolih*.
- c) Selain kedua hal tersebut, *Nyampar pikolih* termasuk menjadi cara penyampaian pesan pembangunan yang dikemas menggunakan bahasa seni pedalangan. Pada jejer pertama, penyampaian pesan dengan cara ini sangat bersifat implisit.

Melihat teknik yang digunakan dalam menyampaikan pesan pembangunan, dalang membawakan sebuah cerita wayang berlakon *Bima Suci*. Lakon tersebut menceritakan tentang Raden Werkudara yang menjadi Begawan Bima Suci di Gunung Argakelasa. Mengenal sosok Werkudara dalam cerita pewayangan, ia adalah putra kedua dari pernikahan Dewi Kunti dengan Prabu Panduhewanata. Para peminat wayang purwa di Indonesia lebih mengenal lakon tersebut sebagai lakon *Dewa Ruci*. Lakon *Dewa Ruci* sepenuhnya menceritakan perlambang manusia yang mencari pribadinya, mencari kebenaran sejati.

Pada pementasan wayang kulit purwa, Raden Werkudara ditampilkan dalam adegan jejer dan adegan bilamana Begawan Bima Suci harus menghadapi kekacauan di wilayahnya. Guna mempermudah edukasi terhadap penonton, pesan-pesan Orde Baru turut disampaikan pada adegan *gara-gara*. Dalam adegan *gara-gara* dalang

menceritakan bencana yang menimpa negara pewayangan tentang gunung-gunung meletus, banjir dan badai, gempa bumi, kekacauan serta kerusakan. Perpaduan gara-gara gaya Surakarta dengan gaya Yogyakarta diperkenalkan pertama kalinya oleh Ki Narta Sabda pada periode 1961-an. Setiap lakon yang diceritakan, dalang memunculkan para Punakawan yang membawa suasana kepada antiklimaks. Para Punakawan terdiri atas: Semar Badranaya (Manikmaya), Petruk (Dawala), Gareng dan Bagong (Kuning, 2011). Peragaan tokoh Punakawan menciptakan suasana keakraban antara dalang dengan penonton. Dalang melukiskan ucapannya pada adegan gara-gara sebagai berikut:

*“Candrane gara-gara, bumi gonjang ganjing langit gumarang tangise bumi kalawan langit, tan ana bedane. Tangise bumi, sedina lindhu kaping wolu, jagad pada den tapeni, nganti akeh para kawula kang tintrim. Ana ketiga dawa, lemah bengkah, bledug mangampak, panjerite sapi gumarang, katon bisa nimbulake pageblug...”*  
(Wawancara dengan Dalang Tugino, Gumelar: 20 Oktober 2020).

Sepenggal kalimat tersebut merupakan kesempatan bagi dalang untuk menyampaikan pesan-pesan Orde Baru yang meliputi pembangunan, pendidikan, keamanan, propaganda, dan kritik sosial. Tokoh Semar mengambil peran dalam adegan gara-gara untuk tampil membicarakan hal-hal yang sifatnya serius. Sama halnya dalam kisah Mahabarata Jawa, oleh sang pencipta lakon, Semar menjadi tokoh yang memiliki peran multidimensi, antara lain pembawa misi kerakyatan, menumpas kejahatan, punakawan sekaligus guru, penghibur atau penglipur lara.

### **Propaganda Pembangunan**

Sejauh kepemimpinan Soeharto, dinamika pembangunan di Indonesia khususnya Jawa Tengah relevan dengan amanat yang terkandung pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Agenda maupun kebijakan pemerintah Orde Baru dalam kurun waktu 1966 hingga 1980-an sebagai perwujudan dari propaganda Trilogi Pembangunan. Indikator yang menggaris bawahi objek pembangunan di Indonesia tercermin dalam Trilogi Pembangunan. Potret pembangunan bergantung pada Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dikarenakan, APBD merupakan cermin kebijaksanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk angka-angka (Hendrawan, 1997).

Pentas rutin yang digelar di sembilan kecamatan mulanya hanya untuk menghidupi perekonomian para dalang. Dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, pertunjukan wayang kulit tersebut menjadi dimaksudkan untuk mengembangkan moral pejabat dan masyarakat (Kedot, 2020). Seirama dengan kebijakan Pembangunan Lima Tahun IV (1984-1989) daerah Jawa Tengah tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Penyisipan pesan-pesan pembangunan tidak hanya melalui adegan wayang, tetapi juga menggunakan Gendhing-gendhing yang selaras dengan nuansa pembangunan. Pencipta iringan yang ber lirik pembangunan ialah sang maestro seni pedalangan Ki Narta Sabda. Gendhing-gendhing kebijakan

pembangunan tersebut hingga hari ini masih tersedia di pustaka Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Semarang. Untuk menghidupkan kebijaksanaan pemerintah, gendhing-gendhing karya Ki Narta Sabda yang mulai dipentaskan dalam periode 1986 hingga 1998 yaitu:

- 1) Lancaran Identitas Jawa Tengah
- 2) Ladrang Ambangun laras pelog pathet nem
- 3) Lelagon Aja Dipleroki laras pelog pathet nem
- 4) Ladrag Keluarga Berencana Bagya

Kutipan lirik gendhing bernuansa pembangunan Ladrag Ambangun laras pelog pathet nem yang sering dijadikan iringan adalah sebagai berikut (dalam bahasa Indonesia).

“Waktunya membangun, seiya sekata, tua muda mari bekerja, menyingkingkan lengan baju membangun negara, membangun desa dan jiwa, bersatunya rasa, cipta, budi karsa, demi keluhuran bangsa, lepas aral melintang Indonesia merdeka.” (Kedot, 2020)

Penyampaian pesan pembangunan dalam aspek ekonomi melalui teknik melok dan medhang miring sangat ditampakkan dalam dialog antara Semar dengan Parikesit pada lakon *Bima Suci*. (Tim PEPADI Banyumas, 1990)

#### SEMAR

“Niki, ngaten sinuwun Radhen Puntadewa, sampeyan niku dadi pangarsaning praja ngraosaken napa boten to ? Jagad niki mpun kebak dahuru, kathah ruhara, daredah saenggen-enggen. Sinuwun, mila jagad niki kebaking daredah, sarta bencana wonten pundi mawon jalaran umating Gusti kang Maha Suci niki, mpun koncatan jiwa tigang perkawis

- Siji, kathah tiyang sing sami koncatan jiwa kamanungsan. Tuladhanipun, sakmenika kathah tiyang ingkang tumindak nalisir dhateng bebener. Kados ta, wong tuwa tegel mateni anake dhewe, kosok wangsule, anak tegel materni tiyang sepuh, guru mateni muride, murid tegel mateni gurune.

- Kalih, kathah tiyang sing mpun koncatan jiwa katresnan. Lire, tiyang sami boten gadhah tepa salira. Boten ngelingi yen menungsa niku maha alite Gusti Allah. Dados saenipun tiyang niku yen dijiwit krasa lara, ya aja njiwit. Yen dipoyoki lara atine, ya aja moyok.

- Tigo, kathah tiyang sing sami koncatan jiwa kabangsan. Racakipun sakmenika kathah tiyang ing nilaraken sejarah. Rikala kula taksih enem rumiyin kamare niku gambar para pahlawan. Ning seniki, gambare wong wadon.

Lha sampeyan sing dadi pangarsa kok mendel mawon niku pripun den, mesthine panjenengan niku dadi pangarsaning praja kudune aja dumeh. Peduhe lagi duwe panguwasa banjur kumasa. Peduhe lagi duwe wewenang banjur tumindak sewenang-wenang. Elingna Dhen...tiyang niku boten badhe ajeg. Nyakra manggilingan. Kula kewatos mbok panjenengan kewirangan. Luwih-luwih ratu niku

*pangandikane sekecap tinuku sewu. Boten kenging miyar miyur, kedah jejeg adegipun.”*

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

### SEMAR

“Begini Tuan Puntadewa, kalian itu sebagai perwakilan pemerintah apakah tidak merasakan? Dunia ini sudah banyak konflik, banyak huru-hara yang terjadi dimana-mana. Sembah Paduka, maka dunia ini sangat penuh dengan konflik, serta bencana dimana-mana akibat perbuatan umat Tuhan yang Maha Suci tersebut sudah kehilangan jiwa yang mneyangkut tiga perkara:

- Satu, banyak orang yang kehilangan jiwa kemanusiaan. Contohnya, banyak orang yang berperilaku semena-mena. Seperti orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri, sebaliknya anak tega membunuh orang tua, guru membunuh muridnya, dan murid tega membunuh gurunya.

- Dua, banyak orang yang kehilangan rasa mencintai sesama makhluk hidup. Misalnya, orang tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Tidak sadar bahwa manusia adalah makhluk kecilnya Tuhan. Alangkah baiknya, jika seseorang merasakan sakit ketika dicubit maka jangan mencubit terlebih dahulu. Begitu juga jika seseorang sakit hatinya apabila dihina, maka jangan menghina orang lain.

- Tiga, banyak orang yang kehilangan jiwa kebangsaan. Realitanya banyak orang yang melupakan sejarah. Ketika saya masih muda, dahulu kamar saya penuh dengan gambar para pahlawan. Namun pada hari ini, malah memasang gambar seorang perempuan.

Lha kalian yang menjadi pejabat kok diam saja itu bagaimana Den, jangan mentang-mentang menjadi pejabat negara. Karena sedang berkuasa lantas semaunya. Karena sedang punya wewenang lantas bertindak sewenang-wenang. Ingat Den, orang itu tidak akan selamanya tetap. Roda berputar terus menerus. Saya khawatir kalian akan membuat malu negara. Lebih-lebih perkataan ratu yang terucap satu kata pun terbeli seribu. Dilarang kesana-kemari, harus berdiri tegak.”

Kembali kepada strategi kunci Trilogi Pembangunan selain REPELITA, salah satu di antaranya yaitu Program Keluarga Berencana. Sebagai media propaganda, pertunjukan wayang kulit purwa menajamkan visi misi program Keluarga Berencana seperti melalui gendhing- gendhing Ladrag Keluarga Berencana Bagya karya Ki Narta Sabda. Seniman dalang di Banyumas, termasuk Ki Dalang Kedot Suprpto ikut serta menciptakan lagu KB yang berbunyi sebagai berikut (terjemahan dalam bahasa Indonesia).

“Sudah saatnya ikut KB, Keluarga Berencana. Itu tidak diragukan lagi, sangat besar manfaatnya. Hidup akan lebih sejahtera, Putra-putri bangsa tumbuh sehat, cerdas, kuat. Menjadi satria yang mengharumkan bangsa, wajib turut serta

membela negara. Bapak dan Ibu yang sejahtera, Hidup rukun terhindar dari bahaya, marilah hidup tenteram dan saling mengayomi.”

Program swasembada pangan yang menjadi prioritas utama dalam sektor agraris juga mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Pemerintah menitipkan pesan kepada dalang yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan sumber daya Indonesia yang kaya raya, terutama Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Dalang pun bersedia membawakan cerita wayang dengan selingan gamelan menggunakan *gendhing-gendhing* menggunakan *laras slendro patet sanga* yang berjudul Lumbung Desa. Sejumlah karya Ki Narta Sabdha banyak digunakan oleh dalang sebagai panutan dalam menyampaikan pesan pembangunan Orde Baru. Dalam rangka membangkitkan motivasi swasembada pangan di Banyumas, dalang memberikan keteladanannya melalui *gendhing-gendhing* tersebut.

Munculnya *pakeliran* padat pada pertunjukan wayang membantu dalang untuk menyampaikan propaganda politik. Sepenggal sejarah menjelang pemilihan umum tahun 1987, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye Pemilu. Sudah sejak 1971, sebelum Pemilu Ali Moertopo selaku rival Soeharto dalam konferensi pers menyatakan bahwa akan ada restrukturisasi paryai politik (Historia & Moetopo, 2020). Perombakan partau tersebut lebih tepatnya melalui pembubaran partai politik setelah kemenangan Golkar. Sangat terasa di Banyumas adanya perbedaan partai politik dari masa lalu. Doktrin-doktrin kebijakan Orde Baru menggambarkan bagaimana cara pemerintahan Soeharto berkuasa.

Skema “deparpolisasi” dan “golkarisasi” membutuhkan strategi yang paling ampuh utamanya dalam momentum Pemilu. Gubernur Jawa Tengah beserta pimpinan pemerintahan di Banyumas mencanangkan strategi Pemilu dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat. Selain bekal kemampuan, pemerintah harus memiliki alat untuk mendukung tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Dalam pendekatan Pemilu yang bertujuan menarik kesadaran politik masyarakat, maka pemerintah memanfaatkan pertunjukkan wayang kulit sebagai sarana operasional Pemilu. Dalang menyajikan lakon wayang kulit *Ringin Kencana* yang sengaja ditampilkan sebagai lambang Golongan Karya, yaitu pohon beringin. Segala kegiatan maupun tindakan yang dipertontonkan dalam wayang kulit purwa semua mengarah pada suksesnya Pemilu.

## **Dinamika Dan Potret Keberhasilan Di Banyumas**

### **Aspek Pemerataan**

Visi misi pemerintah Orde Baru dalam aspek ekonomi dan politik disampaikan melalui pagelaran wayang kulit purwa. Pementasan rutin yang diselenggarakan di Banyumas dalam periode 1987 hingga 1990 telah tercatat sebanyak 27 kecamatan, dengan intensitas paling tinggi berada di Kecamatan Gumelar. Hal ini dikarenakan letak geografis Gumelar yang sangat jauh dari pusat peradaban kota sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan informasi dari pemerintah (Banyumas Dalam Angka 1990). Secara umum pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah dalam wilayah Banyumas utamanya, kedudukan seorang Kepala Daerah pada masing-masing wilayah

dapat dikatakan berhasil baik pada aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Pesan-pesan yang disampaikan melalui cerita wayang kulit purwa mampu menjabarkan garis besar dari pelaksanaan Trilogi Pembangunan di Banyumas. Dalam bidang ekonomi saja, laju pertumbuhan di Jawa Tengah hampir mencapai 10% dari tahun-tahun berikutnya. Representasi keadaan Orde Baru yang timpang melalui adegan tokoh Punakawan dalam lakon Bima Suci telah menciptakan suasana antiklimaks. Penonton berhasil mencerna lakon yang dibawakan oleh dalang yang dibumbui dengan huru-hara di Indonesia. Lagu Ladrang Ambangun ciptaan Ki Narta Sabda yang mengiringi setiap jalannya pagelaran wayang kulit purwa juga berhasil melahirkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pembangunan di Banyumas. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami perkembangan pada bidang jasa, industri, pariwisata, dan perdagangan yang semakin marak. Sementara itu, secara spesifik laju pertumbuhan ekonomi di Banyumas menurut hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto pada periode 1980-an telah meningkat baik.

Bupati Banyumas menekankan pembangunan pada aspek sandang, papan, dan pangan maka indeks pencapaian kebutuhan dari masing-masing sub kelompok memiliki peningkatan yang cukup drastis. Sebagai makanan pokok sehari-hari, masyarakat di Banyumas memiliki kegemaran mengonsumsi padi-padian, ubi-ubian, daging, ikan segar, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dan beberapa makanan instan. Selain persoalan pangan, papan atau tempat tinggal juga merupakan objek modernisasi pemerintah Orde Baru. Mulai dari biaya tempat tinggal, penerangan dan air hingga penyelenggaraan rumah tangga telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Selanjutnya masalah sandang bagi penduduk laki-laki dan perempuan baik anak-anak hingga dewasa semuanya tercukupi oleh ketersediaan produk-produk yang beredar di pasar. Mengingat hampir semua jasa, perdagangan dan pariwisata dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga kebutuhan pokok masyarakat di Banyumas pun dapat terpenuhi.

Masyarakat Banyumas yang bekerja sehari-harinya sebagai petani tergugah semangatnya untuk melancarkan sederet program mulai dari swa sembada pangan hingga kebijakan lain yang berorientasi pada kesejahteraan hidup rakyat sendiri. Hal ini terbukti dengan luas wilayah panen dan produksi selama lima tahun sejak 1986 berhasil meningkat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Jawa Tengah Kabupaten Dati II Banyumas cabang Purwokerto mencatat perolehannya dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Luas wilayah panen dan produksi Dati I Jawa Tengah

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1986	63.410	303.734
1987	61.163	308.672
1988	62.493	339.668
1989	63.870	396.159
1990	63.059	365.385

Keberhasilan ekonomi di Banyumas ditandai pula dengan meningkatnya kemajuan di sektor teknologi. Pemerintah Banyumas memasokkan alat-alat pertanian berupa mesin yang lebih modern dibandingkan dengan sebelumnya. Dari 27 kecamatan yang masing-masing memiliki tanah kering dan lahan basah yang begitu luas, jumlah panen yang diperoleh masyarakat dipicu pula oleh kemajuan alat-alat pertanian yang digunakannya. Hingga periode 1990, jenis dan banyaknya alat yang masih bisa digunakan dalam bidang pertanian dan perkebunan di Banyumas antara lain traktor roda dua untuk mengolah tanah sebanyak 368, hand sprayer sebanyak 6.152 untuk memberantas hama, knapsack motor sprayer 7 buah, skid motor sprayer 5 buah, dan emposan sebanyak 491, alat pengolah padi (perontok, pengering, pembersih gabah, penyosoh beras, penggilingan padi) berjumlah 559 alat, pompa air sebanyak 59, serta alat pengolah perkebunan (pengolah jagung, pengolah ubi kayu, pembuat tepung beras, pamarut kelapa, huller) yang seluruhnya jika dijumlahkan sebanyak 133 alat (Banyumas Dalam Angka 1990).

Upaya swasembada pangan secara kontinuitas di Banyumas menghasilkan beras IR/Cisadane sebagai hasil pertanian yang berkualitas. Rata-rata harga sembilan bahan pokok semenjak 1986 hingga 1990 memang meningkat setiap tahunnya. Ke sembilan bahan pokok tersebut terdiri dari beras Cisadane, ikan asin Teri, minyak goreng barco/sayur, gula pasir SHS I, garam bata, minyak tanah eceran, sabun cuci Rinso, textile teteron polos, dan batik kasar kerang Banyumasan. Sejumlah sektor industri yang memproduksi di Banyumas adalah industri makanan dan minuman, industri sandang dan kulit, industri bahan kimia dan bahan bangunan, industri kerajinan dan umum, serta industri logam.

Pemerintah daerah dan para seniman dalang berkeja sama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Banyumas. Salah satunya adalah permasalahan pendidikan di Banyumas yang masih banyak ketertinggalan tepatnya di pelosok desa-desa di daerah tersebut. Atas dasar minimnya pengetahuan seseorang, terkadang masyarakat menjadi abai terhadap perintah pemerintah yang disampaikan oleh dalang. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan ekonomi, pemerintah turut

memberikan perhatian terlebih sarana dan prasarana pendidikan di daerah pelosok (Banyumas Dalam Angka 1990).

### **Aspek Pertumbuhan Penduduk**

Kebijakan program Keluarga Berencana sangat penting artinya bagi kesejahteraan keluarga. Awalnya, pelaksanaan program KB memiliki tantangan yang cukup berat khususnya di Jawa, dimana mayoritas penduduknya memiliki keyakinan “banyak anak maka banyak rezeki”. Program KB telah diatur oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dibentuk tahun 1970. Pagelaran wayang kulit menggunakan lakon Bima Suci dengan selingan tokoh Punakawan yang menyinggung pertumbuhan penduduk berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat Banyumas. Strategi yang diterapkan dalam kebijakan KB adalah lahirnya jumlah penduduk yang sejajar dengan laju pembangunan.

Melalui program ini, masyarakat dapat mengendalikan angka kelahiran, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak, serta harapan hidup panjang. Puncak dari realisasi program ini ketika akhir dari Repelita V, dimana pada Kabupaten Banyumas sendiri berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Penduduk sebanyak 1.295.252 jiwa pada tahun 1985 mengalami kenaikan hingga 77.771 kelahiran di tahun berikutnya (Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1990). Setelah program Keluarga Berencana mulai dipropagandakan sejak tahun 1986, Banyumas berhasil menekan laju pertumbuhan sebanyak 70.000 jiwa.

Jumlah pertumbuhan penduduk di Banyumas didominasi oleh jumlah kelahiran penduduk berjenis kelamin perempuan. Selama periode 1985-1990, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas mengalami pasang surut. Presentase naik turunnya pertumbuhan penduduk tersebut secara runtut dapat dipresentasikan sebesar 1,04%; 1,37%; 0,85%; 0,53%; 0,81%; dan 0,66%. Dalam tingkat nasional, pada masa Pelita III tingkat kematian bayi di Indonesia berjumlah 100/1000 kelahiran. Namun mulai 1990-an angka kematian dapat ditekan menjadi 50/1000 kelahiran. Orde Baru sangat memperhatikan kesehatan masyarakat dengan begitu jeli. Persepsi orang terhadap “banyak anak banyak rezeki” turut berubah menjadi “keluarga kecil bahagia”. Laju pertumbuhan penduduk berhasil terus ditekan. Pada periode 1971-1980 laju pertumbuhannya penduduk masih berkisar 1,64% dan pada kurun waktu 1981-1990 angka pertumbuhannya berhasil ditekan menjadi 1,18% (Kristiawan, dkk., 1996). Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa Jawa Tengah memiliki angka pertumbuhan penduduk yang masih berada di bawah angka pertumbuhan nasional.

### **Kuningisasi Banyumas**

Pelaksanaan pemilihan umum sudah menjadi salah satu tugas penting setiap Kepala Daerah untuk menyelenggarakannya. Sukses atau tidaknya Pemilu bergantung pada keobjektifan yang disertai bukti-bukti akurat. Sesuai Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu bentuk kedaulatan rakyat adalah melalui Pemilu yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil. Pasca restrukturisasi partai pada tahun 1971, pemerintah mengelompokkan tiga partai yang bertahan sejak saat itu hingga reformasi. ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (yang semula Sekber Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Historia & Moetopo, 2020). Golkar memperoleh suara lebih dari 62,8% yang mengalahkan sembilan partai politik lainnya. Maka sejak Pemilu 1971, Golkar selalu menjadi *single majority* di Jawa Tengah. Kemenangan perolehan suaranya menjadi target pada Pemilu berikutnya.

Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan sebagai jembatan dalam menyalurkan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait Pemilu. Pemerintah Daerah dari masing-masing wilayah pasti lebih dekat dan mengenali karakteristik masyarakatnya. Para Kepala Daerah ini juga wajib memahami potensi atau kendala dalam menciptakan keberhasilan Pemilu baik di tingkat daerah maupun nasional. Provinsi Jawa Tengah beserta segenap pimpinan daerah di Banyumas mengemban tugas untuk menjamin suksesnya Pemilu 1987. Pemilu yang dilaksanakan pada 1987 berarti juga sebagai keberhasilan dalam mempertahankan perjuangan pembangunan yang sudah dirintis sejak berdirinya negara Indonesia. Cita-cita bangsa selama ini berhasil mendapatkan jaminan akan terwujudnya segala aspek kebijakan rezim baru tersebut.

Faktor keberhasilan Pemilu salah satunya dipicu oleh faktor kepemimpinan dan dukungan rakyat. Seorang pemimpin sudah semestinya menjadi tokoh utama yang telah melewati pendidikan, latihan dan ribuan pengalaman. Segenap tokoh anggota DPRD Kabupaten Banyumas harus mengemban tugas-tugas negara yang berat. Lebih dari sosok kepribadiannya yang mencakup kepemimpinan, manajerial, serta mekanisme dalam mengatur tugas negara, seorang pemimpin juga harus mampu bergaul dengan masyarakat. Pemimpin yang mendekati dengan rakyat maka akan lebih dapat memahami aspirasi mereka yang mencakup harapan dan keluhan-keluhan mereka. Partisipan Golkar yang naik daun pada periode 1987-an antara lain adalah Drs. Mohamad Iskak, H. Soehadi Mangkuwinoto, M. Karsidi, Soedaris, Maohdjoeb, Slamet Riyadi, Ny. Hasni Sudyanto, dan 15 orang lainnya (Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1987).

Mulanya, demi keberhasilan Pemilu 1987 pemerintah daerah Banyumas tidak hanya mengenalkan para calon pemimpin secara personal kepada masyarakat setempat. Melainkan melalui pesan-pesan yang disisipkan pada pagelaran wayang kulit menjadi upaya keberhasilan Pemilu tersebut. Pagelaran yang seringkali diselenggarakan berhasil membawa pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat. Sesuai target yang diharapkan pemerintah, suara Golkar di Jawa Tengah berhasil memperoleh suara sebesar 9.808.148 atau 68,13% (Kristiawan, dkk., 1996). Jika dianalisa, perbandingan perolehan suara pada Pemilu 1971 suara Golkar berhasil meningkat sebanyak 5,33% dengan jumlah kursi sebanyak 54. Sementara itu, perolehan suara oleh pihak oposisi dalam presentase adalah PPP sebesar 18,29% dan PDI hanya memperoleh 13,57% suara.

Kemenangan Golongan Karya pada Pemilu 1987 di Banyumas secara spesifik dilihat dari komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas. Karya Pembangunan atau yang lebih dikenal sebagai Golkar telah memperoleh jumlah kursi sebanyak 23

kursi, PPP 5 kursi, PDI 8 kursi serta Fraksi ABRI sebanyak 9 kursi dengan nama-nama pimpinannya sebagai berikut (Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1988).

Nama (1)	Jabatan (2)
1. Drs. H. Moch. Iskak	Ketua DPRD
2. Let Kol Art MH Hutauruk	Wakil Ketua DPRD
3. Sujatno Wirosujitno BSc	Wakil Ketua DPRD
4. Sunardi	Sekretaris DPRD
5. Drs. H. Moch Iskak	Ketua Panitia Anggaran
6. Drs. H. Moch Iskak	Ketua Panitia
7. Let Kol M Yusuf M	Musyawarah Ketua
8. Soedaris	Komisi A
9. Soemedi BSc	Ketua Komisi B
10. H. Soehadi Mangkuwinoto	Ketua Komisi C
11. M. Karsidi	Ketua Komisi D
	Ketua Komisi E

**Tabel 2.** Pemilu 1987 (Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1988)

Secara keseluruhan Golkar mendominasi suara dengan perolehan 23 kursi. Oleh karena itu, jabatan dalam pemerintah terdiri atas 1 orang Ketua dari fraksi Golkar, 2 orang Wakil Ketua dari fraksi PDI dan ABRI, 4 orang Pelapor dari masing-masing partai (PPP, Golkar, PDI, dan Fraksi ABRI) serta terdiri dari 7 anggota yang didominasi oleh Golkar sebanyak 4 orang. Kemenangan Golkar merupakan gebrakan yang telah dilakukan melalui segenap kader-kadernya. Melihat sosok pemimpin Jawa Tengah, terutama Banyumas sejak awal memang berjuang untuk selalu mendongkrak perolehan suara Golkar. Strategi yang diciptakan pemerintah Banyumas sejak awal sudah dilakukan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa itu Golkar, apa visi dan misi yang ingin dicapai, bagaimana Golkar dapat merealisasikan pembangunan di masa mendatang. Partisipan Golkar termasuk seniman dalang akan mendialogkan dengan tanpa terkecuali dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, baik pengusaha maupun pengangguran tidak ada unsur diskriminasi.

Sikap dan langkah yang ditempuh pemerintah bersama penggiat kebudayaan di Banyumas pada akhirnya melahirkan rasa diuwongke (diorangkan). Masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah. Segala profesi yang digeluti masyarakat Banyumas hampir semua diinterogasi masalah-masalah mereka

## Kesimpulan

Pagelaran wayang kulit purwa pada era Orde Baru sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat telah memberikan gambaran tentang banyak hal. Segala macam perbuatan yang dilakukan masyarakat sebagai bukti antusiasme menjadi penonton mengandung pelajaran sosial yang dapat dikemukakan. Tanggapan-tanggapan dari para penonton lepas tertumpah saling mengungkapkan perasaan dalam kegaduhan. Permainan seorang dalang yang mampu mengatasi jalannya pagelaran secara baik membuat terpukau di hadapan penonton. Mengacu pada hal isi saja, penonton sangat tertarik saat dalang sedang menyinggung keadaan-keadaan masa itu, yaitu puncaknya pada akhir cerita kembalinya Raden Werkudara ke negara Amarta. Alur cerita berhasil dibawakan dalang menuju puncak klimaks, yaitu pada saat adegan gara-gara, dikemukakanlah berbagai macam permasalahan dalam negeri seperti penyalahgunaan kekuasaan, bencana alam, begitu juga tentang Pemilu 1987.

Sindirannya yang lugas dilontarkan dalam laon tradisional oleh tokoh penasehat Kyai Semar. Pada umumnya dalang membawakan sindiran-sindiran halus mengenai masalah kenegaraan dengan adegan selingan banyol atau lelucon. Menarik untuk diperhatikan, bahwa sebelum dalang menyampaikan amanat, pada adegan paseban jawi ditampilkan masalah kepemimpinan. Dalang secara tidak langsung mengajari Dalang secara tidak langsung mengajari rakyat untuk menolak pemerintah yang kebijaksananya patut untuk tidak disenangi. Lanjut kepada adegan *sabranagan*, dalam lakon Bima Suci mulai ditunjukkan adegan prang gagal atau suasana perang. Dalang dengan lihainya memainkan wayang yang sering kali menang dalam dialog sangat membuat penonton terpukau.

Tanpa sosok dalang, pemerintah akan kurang maksimal dalam merealisasikan kebijaksananya. Mengingat jumlah penduduk di Indonesia sangatlah banyak dan tersebar di seluruh pelosok negeri yang tidak bisa dijangkau pemerintah satu per satu. Sebaliknya, tanpa pemerintah dalang tidak akan bisa menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Selama bertahun-tahun dalang menjadi alat penerang bangsa, bukan berarti ia tak punya hambatan semasa pentasnya.

Secara nasional kebijaksanaan yang telah dikondisikan sedemikian rupa kenyataannya tidak seluruhnya optimal. Pembangunan dan stabilitas politik masih jauh dari realita praktek sosial. Pemerataan pembangunan terutama melalui peningkatan fasilitas, industri, pertanian dan jasa hanya menguntungkan segelitir orang saja. Akan tetapi, di tengah maraknya permasalahan ketimpangan sosial ekonomi, Banyumas secara umum mengalami pembangunan yang merata. Bukankah memang perkara yang biasa, hingga hari ini Indonesia memiliki penduduk golongan orang kaya dan di lain pihak melimpahnya golongan orang-orang miskin.

## Daftar Rujukan

- Adisarwono, S., and Bambang S. Purwoko BA. (1992). Sejarah Banyumas. Purwokerto: UD. Satria Utama
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas. (1987). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1987*, Kantor Statistik Kabupaten Banyumas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas. (1988). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1988*, Kantor Statistik Kabupaten Banyumas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas. (1989). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1989*, Kantor Statistik Kabupaten Banyumas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas. (1990). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1990*, Kantor Statistik Kabupaten Banyumas.
- Ensiklopedia Wayang Indonesia 2. (1999). Jakarta: SENA WANGI.
- Groenendael, Victoria M. Clara van. (1987). *Dalang Di Balik Wayang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Harsutejo. (2010). *Kamus Kejahatan Orba*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Haryanto, S. (1991). *Seni Kriya Wayang Kulit Seni Rupa, Tatahan, Dan Sunggingan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Herusatoto, H. Budiono. (2008). *Banyumas Sejarah, Budaya, Bahasa, Dan Watak*. Yogyakarta: LKiS.
- Juono, Umar. (1985). *Masalah Terdepan Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kristiawan, Abdul Suhadi, and Sukamto. (1997). *Soewardi Dalam Dinamika Pembangunan Jawa Tengah*. Semarang: BERANDA.
- Kuning, Bandung Layung. (2011). *Atlas Tokoh-Tokoh Wayang; Dari Riwayat Sampai Silsilahnya*. Yogyakarta: NARASI.
- Kustopo. (2008). *Mengenal Kesenian Nasional 1 Wayang*. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Lewis, W.S. (2014). Art or Propaganda? Dewey and Adorno on the Relationship between Politics and Art. *The Journal of Speculative Philosophy*.19(1), 42–54.
- Mas'ood, Mohtar. (1989). *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- MS, Tommy Suprpto. (2011). *Komunikasi Propaganda*. Yogyakarta: CAPS.
- Mulyono, Sri. (1976). *Wayang: Asal-Usul Filsafat Dan Masa Depan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Pathokan Pedhalangan Gagrag Banyumas. (2013). Jakarta: Balai Pustaka.
- Purna, Made, dan Sri Guritno. (1997). *Arti Makna Tokoh Pewayangan Mahabarata Dalam Pembentukan Dan Pembinaan Watak (Seri III)*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Kebudayaan.
- Reeve, David. (2013). *Golkar Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- S, Arief Adityawan. (2008). *Propaganda Pemimpin Politik Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Sari, Dewi Ambar, and Lazuardi Adi Sage. (2006). *Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto*. Jakarta: Jakarta Citra.
- Suara Merdeka. (1986). *Kerawanan Menjelang Pemilu '87 Dari Yang Tak Mau Terima Pancasila*. Edisi Februari 1986, No. 350, Th. Ke-XXXVI.
- Sudirman, Adi. (2019). *Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Tim Historia. (2020). *Ali Moertopo*. Jakarta: Kompas